
Jenis Berkas	: Pers Rilis	No. Arsip	: PR.Maret-2021/2
Judul	: JANGAN LALAI DAN LAMBAT, BENAHI ASET SEGERA !	Tanggal	: 15/03/2021
Sub Judul	: BENAHI ASET SEGERA !	Tahun	: 2021
		Penulis	: *FITRA RIAU*

**JANGAN LALAI DAN LAMBAT,
BENAHI ASET SEGERA !**

FR – Fitra mendukung penuh langkah Pemrov dalam membenahi manajemen asset daerah, mulai dari kendaraan dinas, bangunan, gedung maupun asset lainnya. Jika kita lihat data asset yang dimiliki oleh pemerintah provinsi terhadap unit kendaraan dinas. Pemrov Memiliki 2804 unit kendaraan yang dititipkan dimasing- Masing OPD untuk keperluan kerja pelayanan dan mendukung perjalanan kedinasan.

Kendaraan dinas itu terdiri dari Jeep, Mikro buss, Mini Buss, Pick Up, Fuso, Ambulance dan sepeda motor. Perlu diketahui public dari 2804 total kendaraan tersebut, untuk kendaraan dinas yang paling terbanyak dikuasai adalah sekretariat daerah sebanyak 1240 Unit. Badan Pendapatan Daerah sebanyak 198 Unit. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan 133 unit, dan dinas PU/PR 182 Unit. Dinas Lingkungan hidup dan kehutanan 142 Unit dan sekretariat DPRD 115 unit.

Sementara itu, OPD yang menguasai kendaraan dinas yang hanya puluhan saja adalah RSUD arifin ahmad 61 unit. Polisi Pamong Praja 48 unit. Dinas Tenaga Kerja dan Dinas kelauatan dan perikanan masing-masing 44 unit. Dinas perternakan dan kesehatan hewan 42 unit. BPKAD 39 unit. Dinas Sosial 34 unit. Badan penelitian dan pengembangan 30 unit. Dinas Kesehatan dan Dinas perhubungan masing-masing 29 unit. Badan Penghubung dan dinas perindustrian masing-masing sebanyak 28 unit, Dinas Perpustakaan dan kearsipan dan KESBANGPOL masing-masing 24 Unit. Dinas perdagangan, koperasi usaha kecil menengah 23 unit, Inspektorat 22 unit. DPMPSTP dan Bappeda masing masing 20 unit. Dinas Pendidikan, Bappeda dan Dinas pariwisata masing masing sebanyak 20 unit, Dinas Perkim 19 unit, Diskominfo 16 Unit, rumah sakit jiwa tampan 15 unit, Dinas kepemudaan dan olahraga dan distamben masing masing sebanyak 13 Unit, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan anak, Dinas pemberdayaan masyarakat desa masing-masing 12 Unit, RSUD Petala bumi dan badan kepegawaian daerah masing-masing hanya 11 unit. BPBD 10 unit, pengelola 9 unit, Dinas Ketahanan pangan 8 Unit, Dinas Kebudayaan 7 unit, Dinas Kependudukan dan catatan sipil 6 unit. Serta Badan pengembangan Sumber daya manusia 3 unit

Dengan demikian, 2804 Unit kendaraan dinas milik pemprov, Jika ditracking dalam aplikasi asset daerah, bahwa hampir ratusan unit kendaraan tidak terdeteksi nomor plat polisi dan jenis kendaraan dinas yang dikuasai juga tidak terpublis dalam aplikasi manajemen asset daerah ini. padahal tahun 2019 yang lalu sudah cukup waktu pemerintah untuk melakukan pendataan kembali terkait dengan unit kendaraan yang dititipkan kepada OPD tersebut malah justru 2021 ini pemerintah juga masih terlihat lambat dalam membenahi asset ini. ternampak masih ada kendaraan yang tidak terdeteksi pada manajemen aplikasi ini. Ungkap taufik

Menurut Taufik, *“seharusnya pemerintah telah mencatat dan mengarsipkan dokumen yang berkaitan dengan kendaraan dinas ini secara detail mulai dari pengadaan, pembelian, jenis kendaraan, nomor mesin, nomor plat polisi serta siapa yang akan memakai kendaraan ini, tetapi faktanya bahwa, masih ada pencatatan yang masih buruk terkait dengan arsip kendaraan ini. kekhawatiran kami adalah jika kendaraan dinas ini dibeli dan tidak tahu siapa pemakainya apalagi nomor plat polisinya yang tidak terdata dengan baik ini artinya ada kelalaian pemprov terkait dengan pengelolaan asset kendaraan dinas ini dan tentunya asumsi public beranggapan bahawasannya pemprov telah membuka ruang kepada oknum yang berniat ingin menguasai kendaraan ini secara illegal. “*

Oleh karena itu, Jika pemerintah tidak ingin terlihat lalai dan dianggap public membuka ruang kepada oknum untuk menguasai kendaraan dinas secara illegal. seharusnya gubernur dan jajarannya harus berupaya secara

cepat menyelesaikan problem ini jangan harus menunggu kritikan terlebih dahulu baru pemda mau bergerak membenahi asset ini.

Kelihatan lambatnya pemrov dalam menangani asset daerah, berdasarkan temuan LHP BPK Tahun 2019 mencatat bahwa, ditemukan peralatan kendaraan dinas yang belum dikembalikan oleh pejabat pesiunan sebanyak 34 Unit, dengan nilai Rp 4.9 Miliar dan 27 Unit kendaraan tidak dikembalikan dan dilaporkan oleh pejabat pemrov dengan status kendaraan hilang, dibawa kabur dan pejabat bersangkutan mengalami mutasi jabatan sehingga belum melaporkan. Serta 24 Kendaraan dinas yang dipinjam pakaikan kepada organisasi vertikal tanpa BAPP

Selain problem kendaraan dinas, pemrov riau juga belum terlihat gerakan pembenahan asset pada bangunan gedung milik daerah. Dari hasil temuan LHP BPK tahun 2019 saja menyebutkan ada 11 gedung milik daerah yang belum didukung dengan surat perjanjian pinjam pakai yaitu : Gedung PWI cabang riau, Gedung veteran, gedung balai wartawan, gedung juang 45, gedung antara, gedung golkar, gedung knpi, gedung lam riau, gedung guru, gedung pramuka, gedung sekretariat koni.

Taufik mengatakan “ jika ingin Melihat keseriusan pemprov dalam pengelolaan asset dilihat dari hasil temuan LHP BPK Tahun 2019 kemarin apakah sepenuhnya Gubernur syamsuar sudah menjalankan rekomendasi itu atau belum. Sampai saat ini publik juga belum mengetahui juga, apakah pemerintah provinsi sudah menjalankan rekomendasi perbaikan atas temuan BPK Tahun 2019 tersebut, apakah pemerintah provinsi sudah menyurati instansi lembaga tersebut untuk diperpanjang surat pinjam pakai atau masih belum. Nyata problem gedung DPD golkar sebagai jawaban masih menimbulkan polemik artinya gubernur riau masih lalai, tak progres dalam menjalankan rekomendasi BPK itu” Ungkap Taufik.

BENAH ASET, SEGERA !

Pernyataan KPK yang disampaikan oleh Direktur Wilayah 1 korsup KPK, menegaskan kembali bahwa pemerintah provinsi riau harus berupaya maksimal dalam membenahi asset daerah, jika dilihat gerakan dua tahun ini pemprov belum melakukan apa-apa terkait dengan pembenahan asset ini yang dilakukan pemrov hanya membuat aplikasi resam dan sudah dilaunching tetapi untuk gerakan aksi nyata belum terlihat.

Oleh karena itu adanya dukungan dari KPK menambah penguatan pemrov untuk melakukan gerakan cepat dalam memperbaiki pengelolaan asset yang selama ini masih terlihat lambat. Untuk mempercepat gerakan pembenahan asset pemprov jangan segan - segan menertibkan aset yang masih dipenggang oleh pensiunan. Jika ditemukan dijalanan bahwa kendaraan dinas masih dipakai silahkan pemrov lakukan penarikan paksa sesuai aturan dan jika masih berusaha mengelak silahkan pemrov lakukan upaya hukum.

Begitu pula dengan persoalan gedung milik pemerintah yang dipinjam kepada pihak kedua, gubernur harus bisa memerintahkan sekda serta Kepala BPKAD untuk mengkresecek dan melakukan pendataan ulang, pemerintah bisa melakukan upaya upaya humanis dalam menyelesaikan problem asset itu, dengan memperpanjang surat perjanjian pinjam pakai dan melakukan segera sertifikat tanah tanah yang menjadi hak milik pemerintah daerah. **